

# KERAGAAN BEBERAPA POLA USAHA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT OLEH RAKYAT DI INDONESIA

Oleh:  
Abunawan Mintoro\*)

## Abstrak

Selain pola usaha perikanan rakyat dengan T.P.I (Tempat Pelelangan Ikan) di beberapa daerah di Indonesia terdapat pola lain, diantaranya ialah pola "toke" di Langkat, Sumatera Utara, "penyambang" di Kalimantan Selatan, SSFDP (Small Scale Fisheries Development Project) di Lombok.

"Toke" adalah pengusaha yang mengelola beberapa perahu penangkapan dalam hal penyediaan sarana penangkapan dengan dan tanpa kredit, pemrosesan ikan, memasarkan ikan, memberi kredit pada nelayan untuk keperluan rumah tangga. "Penyambang" adalah pedagang ikan yang dengan perahunya mengikuti nelayan bermigrasi musiman, selain membeli ikan "penyambang" juga menyediakan keperluan-keperluan pokok di lokasi nelayan bermigrasi. SSFDP adalah proyek pembinaan nelayan dengan dana bantuan dari Jerman melalui G.T.Z. Nelayan dibina dalam tehnik penangkapan dengan kapal bermotor yang dimiliki secara bersama oleh seluruh awak kapal dengan sistem kredit. Selain hal tersebut nelayan dididik dalam kelompok U.B (Usaha Bersama) yang mengurus keperluan nelayan untuk melaut. Dengan memperbandingkan keempat pola usaha tersebut dalam kegiatan pra-pasca penangkapan dan penangkapan didapatkan beberapa kesimpulan diantaranya: pola "penyambang" sesuai untuk daerah terpencil, kelompok nelayan heterogen (integrasi kegiatan pra-pasca penangkapan dan penangkapan dalam satu unit usaha) merupakan salah satu unit usah..) merupakan salah satu alternatif pola pembinaan nelayan.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang dan Permasalahan

Lebih kurang sembilan puluh persen nelayan Indonesia termasuk dalam kategori nelayan berskala kecil yang diusahakan oleh lapisan bawah (untuk selanjutnya usaha penangkapan ikan di laut oleh rakyat sama dengan perikanan rakyat), yang antara lain mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. dalam operasi penangkapan mempergunakan perahu dan alat sebagian diantaranya belum mempergunakan motor,
- b. lamanya beroperasi di laut dalam satu periode penangkapan (satu trip) sekitar sehari,
- c. daerah penangkapan ikan disekitar pantai,
- d. dalam penyediaan sarana produksi yang terdiri dari bahan-bahan perbaikan peralatan penangkapan dan perbekalan untuk melaut, serta pemasaran ikan banyak yang terikat hutang pada pedagang melalui hutang,
- e. tingkat pendidikan sebagian besar masih rendah,

- f. lama usaha penangkapan dalam satu tahun sangat dipengaruhi oleh musim ikan dan keadaan cuaca disuatu area sehingga hari kerjanya menjadi lebih pendek dari potensi yang ada. Dengan perkataan lain kemampuan teknis yang rendah menyebabkan kurang bisa memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Bila dikaji lebih lanjut akan ditemui lebih banyak kriteria yang umumnya menunjukkan ciri-ciri golongan yang lemah, yang dalam program pembangunan perikanan melalui perkreditan sebagian besar nelayan tidak bisa mengembalikan jumlah kredit yang dipinjam.

Sifat ikan tangkapan yang mudah rusak dan busuk bila tidak diawetkan menyebabkan usaha perikanan rakyat tidak dapat dipisahkan oleh sistem pemasaran yang ada. Guna membina masyarakat

---

\*) Staf Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

nelayan, pemerintah antara lain membangun Tempat Pelelangan Ikan (T.P.I) yang tersebar diseluruh Indonesia. Melalui T.P.I diharapkan nelayan bisa mendapatkan harga yang lebih baik daripada tanpa T.P.I; tingkat stabilitas harga di tingkat T.P.I harga relatif bisa stabil daripada tanpa T.P.I, hal tersebut antara lain berlaku di beberapa T.P.I di Jawa.<sup>1)</sup>

Adalah gejala yang universal bahwa pola dinamika kehidupan berbeda-beda sesuai dengan pengaruh-pengaruh alami yang ada secara lokal. Hal tersebut juga berlaku pada masyarakat nelayan meskipun sudah ada pola umum pemasaran ikan melalui T.P.I tetapi ada pengaruh-pengaruh lokal yang mengharuskan nelayan membentuk pola yang berbeda pada masing-masing wilayah. Timbulah sistem pemasaran yang berbeda pada beberapa lokasi. Karena pola pemasaran sangat berpengaruh pada seluruh kegiatan nelayan maka pola usahanyapun juga berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pola pemasaran yang ada. Indonesia yang memiliki variasi tipe agro ekologi dan sosial ekonomi yang besar menyebabkan perbedaan pola usaha perikanan rakyat antar daerah tidak dapat dihindari.

### Tujuan Pengkajian

1. Melihat dan menganalisa perbedaan-perbedaan pola usaha perikanan rakyat di beberapa lokasi di Indonesia.
2. Menganalisa penyebab perbedaan-perbedaan pola usaha perikanan rakyat.

Dengan melihat beberapa perbedaan pola usaha perikanan rakyat dan penyebabnya diharapkan dapat lebih memahami kehidupan nelayan guna pembinaannya.

### Kerangka Pemikiran

Pola usaha bisa didekati dengan pendekatan sistem dimana di dalam sistem bisa dianalisa interaksi antara unsur-unsur sistemnya. Dalam masyarakat nelayan interaksi terjadi antara nelayan, pe-

dagang dan pembina. Interaksi tersebut dapat dikategorikan dalam tiga kategori ialah:

A. *Kegiatan pra penangkapan*, kegiatan ini bisa dibagi dua:

1. Mempersiapkan peralatan penangkapan ikan sebelum melaut (menangkap ikan). Bagi nelayan yang memiliki peralatan penangkapan maupun sebagai nelayan buruh, kegiatan persiapan tersebut karena dilakukan setiap akan melaut. Kegiatan tersebut meliputi pembelian bahan-bahan perbaikan alat penangkap yang rusak misalnya tali-temali, pancing. Penyediaan kebutuhan-kebutuhan tersebut umumnya terdapat di warung-warung disekitar lokasi pemukiman nelayan dan T.P.I. Karena frekuensi kerusakan sebanding dengan frekuensi melaut yang cukup tinggi biasanya pembayaran dilakukan setelah dua-tiga kali melaut dan pencatatan pembelian dan pembayaran dilakukan oleh pemilik warung, nelayan hanya mengecek tiap kali mengambil barang dan membayar.
2. Mempersiapkan bekal untuk operasi penangkapan. Bekal terdiri dari makanan, minuman dan rokok keperluan awak kapal selama di laut, selain itu juga bahan pengawet ikan garam, es, solar bila perahu mempergunakan motor. Besaran bekal tersebut tergantung dari jauhnya tempat penangkapan ikan ("fishing ground"). Umum terjadi meskipun operasi penangkapan di laut cuma sekitar terjadi tetapi karena T.P.I yang berdekatan dengan penangkapan tersebut letaknya jauh dari pemukiman nelayan, perahu penangkapan dapat beroperasi lebih dari sehari. Strategi penangkapan ikan umumnya dikuasai oleh juragan laut (kapten kapal).

Penjualan bahan perbekalan tersebut administrasinya lebih kompleks apa lagi kalau ibu rumah tangga awak kapal yang bersangkutan juga mengambil belanja sehari-hari ditempat itu. Seperti juga pada pembelian bahan-bahan peralatan penangkapan (umumnya warungnya berlainan satu sama lain) untuk memudahkan penjual dan sesuai dengan kemampuan nelayan dalam hutang menghutang administrasi dilakukan oleh pedagang atau kalau ada juragan darat (pemilik modal untuk alat-alat penangkap dan perahu) kesesuaian "administrasi" dilakukan bersama antara nelayan, pedagang dan juragan darat. Kegiatan pembelian tersebut bisa dilakukan oleh bukan awak kapal, awak kapal hanya menentukan jumlah dan jenisnya.

<sup>1)</sup> Manurung, Victor T. dan Mat Syukur: Dampak Pelelangan Terhadap Stabilitas Harga Ikan pada Tingkat Produsen di Pantai Utara Jawa, F.A.E (Forum Agro Ekonomi) Vol.7 No.2 Desember 1989, hal. 19.

## B. Kegiatan Penangkapan Ikan

Dalam kegiatan penangkapan, jenis-jenis kegiatan ditentukan oleh kompleksitas alat penangkapan, semua jenis kegiatan dikoordinasi dan dipimpin oleh juragan laut. Peranan juragan laut sangat menentukan keberhasilan dalam menangkap ikan. Karena itu gaji (bagi hasil) juragan laut lebih tinggi daripada awak kapal lainnya. Awak kapal bisa berpindah-pindah mencari kelompok awak kapal yang sesuai atau mencari juragan laut yang lebih tinggi kemampuannya. Kualitas dari kegiatan penangkapan di laut ini ditentukan oleh ketepatan juragan darat dalam memilih juragan laut yang sesuai dengan alatnya dan juga kemampuan juragan laut dalam memilih dan dipilih oleh anggota kapal yang akan mengikuti.<sup>2)</sup>

## C. Pasca Penangkapan

Dalam kegiatan pasca penangkapan didominasi oleh kegiatan pemasaran ikan, kegiatan-kegiatan lain merupakan kegiatan yang sudah rutin seperti misalnya kegiatan bagi hasil, pengamanan alat-alat penangkap (perahu dan alat-alat penangkap lainnya). Kegiatan perdagangan ikan merupakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh nelayan sendiri dan nelayan biasanya hanya mengikuti pola pemasaran yang sudah ada. Rantai-rantai pemasaran yang cukup kompleks sesuai dengan sifat ikan yang mudah busuk dan rusak menyebabkan kegiatan pemasaran memerlukan kegiatan/orang yang terpisah dari kegiatan penangkapan ikan. Meskipun kegiatan ini sangat besar pengaruhnya dalam pola usaha secara keseluruhan.

Secara umum ketiga kategori kegiatan diatas merupakan kegiatan yang selalu ada pada masyarakat nelayan kecil. Perbedaan pola interaksi dalam kegiatan-kegiatan dapat terjadi pada pola usaha yang berbeda. Ketiga kategori tersebut dapat dianggap sebagai suatu subsistem pada sistem usaha perikanan.

## Metoda Pengkajian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, metoda pengkajian dilakukan dengan metoda perbandingan

antar sistem/pola usaha perikanan yang diketahui melalui analisa perbandingan interaksi antara unsur-unsur usaha perikanan (nelayan, pedagang dan pembina). Bahan kajian didapat secara langsung dan tidak langsung meneliti pola usaha perikanan dengan lokasi:

- 1) Pantai Jawa, untuk pola T.P.I, sumber data pokok: (a) "Dampak Pelelangan Terhadap Stabilisasi Harga Ikan Pada Tingkat Produsen di Pantai Utara Jawa". oleh Victor T. Manurung dan Mat Syukur, F.A.E. Vol.7 No.2 Desember 1989, (b) "Kegiatan Nelayan Di Musim Paceklik Di Empat Propinsi di Pulau Jawa", oleh Team Peneliti, Kerjasama Litbang Depnaker dan Yayasan SAE, Bogor 1982.
- 2) Sepanjang pantai propinsi Kalimantan Selatan, untuk pola "penyambang", sumber data: "Dampak Program Pembangunan Terhadap Tenaga Kerja, Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan Kalimantan Selatan", oleh Abunawan Mintoro dkk., P/AE Bogor 1988.
- 3) Pantai Timur pulau Lombok untuk pola SSFDP (Small Scale Fisheries Development Project), sumber data: "Report of SSFDP Project, Review Mission", Team Konsultan, Jakarta 1990.
- 4) Pantai di kabupaten Langkat, propinsi Sumatera Utara untuk pola "toke", sumber data: "Sistem Pemasaran dan Kredit Informal pada Nelayan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara", oleh Abunawan Mintoro, F.A.E. Vol.7 No.1 Juli 1989.

## BEBERAPA POLA USAHA PERIKANAN RAKYAT

### Pola T.P.I. (Tempat Pelelangan Ikan)

T.P.I yang didirikan oleh pemerintah merupakan pola usaha perikanan yang terlama berlangsung di Jawa terutama di pantai Utara Jawa. Fungsi T.P.I secara resmi adalah melakukan pelelangan ikan dan pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai-pegawai tetap yang digaji secara bagi hasil dari penghasilan T.P.I. Pola usaha perikanan rakyat terbentuk dengan berpusatnya kegiatan T.P.I.

Pelelangan ikan berlangsung tiap hari sesuai dengan masuknya ikan ke T.P.I. Sebelum pelelang-

<sup>2)</sup> Team Peneliti, "Kegiatan Nelayan di Musim Paceklik Di Empat Propinsi di Pulau Jawa", Litbang Depnaker dan Yayasan SAE, Bogor 1982, hal. 6.1 s/d 6.7.

an berlangsung, pembeli/bakul diharuskan menyerahkan sejumlah modalnya kepada kasir T.P.I sebagai jaminan pembayaran tunai ikan yang akan dilelang. Untuk menjaga agar bakul tidak ada yang membeli ikan lebih banyak dari kemampuannya, petugas T.P.I mengamati perilaku para bakul selama proses pelelangan. Artinya apabila pembeli sudah mulai membeli ikan dengan jumlah uang melebihi modal yang disetor ke kasir, maka bagian kasir akan memberi tahu juru lelang bahwa yang bersangkutan tidak menyettor modal yang cukup untuk mengikuti lelang pada periode tersebut.<sup>3)</sup> Di antara pedagang ikan terjadi spesialisasi, misal pedagang ikan segar tidak akan membeli jenis ikan lain yang lebih sesuai untuk diolah menjadi ikan asin walaupun jumlahnya banyak dan harganya murah. Tidak semua T.P.I bisa melakukan pelelangan dengan baik. Dalam keadaan kurang baik fungsi pembelian ikan dilakukan oleh pedagang-pedagang ikan secara langsung ke nelayan dengan pelbagai macam ikatan yang paling umum adalah ikatan pemberian hutang. Tetapi setelah kemudian T.P.I berfungsi dengan baik para pedagang biasanya tetap berusaha mempertahankan perannya dengan bertindak sebagai pedagang perantara untuk menjualkan ikan nelayan pada T.P.I dengan sistem komisi. Hal tersebut dirasakan kegunaannya oleh perahu-perahu nelayan yang menjual ikannya pada T.P.I bukan di daerahnya sehingga kurang mengetahui keadaan setempat.

Dalam pola usaha T.P.I terdapat dua macam penguasaan alat produksi (perahu dan alat penangkap ikan) yaitu nelayan pengusaha dan nelayan pemilik modal yang umumnya disebut "juragan darat". "Juragan darat" berfungsi sebagai manager di darat mengurus keperluan kapal dan memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran untuk kemudian pendapatan bersih dibagi dengan cara bagi hasil yang secara tradisional berbeda tiap lokasi dengan jenis alat penangkap yang dipergunakan. "Juragan laut" (kapten kapal) mendapatkan bagian yang relatif lebih tinggi dari awak perahu lainnya. Tidak jarang "juragan darat" adalah bekas juragan laut yang berhasil mengumpulkan modal.

Dalam pola/sistem T.P.I hubungan yang terjadi antara nelayan dan pedagang ikan cenderung bersifat "impersonal". Hubungan hanya terjadi pada mekanisme pelelangan di T.P.I secara administratif.

<sup>3)</sup> Manurung, Victor T. dan Mat Syukur, loc.cit. hal.14-15.

Dari hasil pengamatan, pada T.P.I di Cilacap, Jepara dan Juwana (Jawa Tengah), kabupaten Trenggalek dan Muncar (Jawa Timur) terdapat beberapa keadaan<sup>4)</sup>:

- a. Banyak pedagang-pedagang ikan yang ikut lelang tidak menyimpan uang di kasir, sehingga pembayaran dilakukan setelah 3 hari sampai beberapa bulan yaitu setelah ikan laku dijual.
- b. Cenderung terjadinya pungutan-pungutan liar terjadi pada saat ikan dilelang baik oleh petugas T.P.I maupun anggota masyarakat (di daerah Jepara disebut "cowakan").
- c. Pada sekitar T.P.I tertentu muncul WTS dan perjudian.
- d. Untuk nelayan yang melelangkan ikan dalam jumlah kecil cenderung lambat pelayannya dengan melelang lebih akhir.

### **Pola "Penyambang"**

Pola "penyambang" terdapat di pantai propinsi Kalimantan Selatan. Pada "Musim Timur", bulan April-Juli terjadi gelombang besar di laut sebelah Timur Tanjung Selatan Kalimantan Selatan. Penangkapan ikan dilakukan di pantai sebelah Barat. Pada "Musim Tenggara", bulan Juli – November, penangkapan ikan dilakukan di bagian Barat Tanjung Selatan. "Musim Barat" penangkapan ikan dilakukan pada sebelah Timur Tanjung Selatan karena gelombang dari Barat cukup besar. Dalam keadaan tersebut nelayan menyesuaikan diri dengan bermigrasi musiman ke daerah dimana penangkapan ikan mungkin dilakukan. Hal tersebut mempengaruhi kerja T.P.I yang ada karena nelayan berpindah mengikuti migrasi ikan, nelayan tidak sempat kembali ke desa dimana ada T.P.I. Lama kelamaan T.P.I di bagian Timur dan Barat tidak berfungsi lagi. Sebagai gantinya pembelian ikan dilakukan oleh pedagang-pedagang ikan yang membawa perahu dan mengikuti nelayan dalam melakukan migrasi musiman. Pedagang-pedagang ikan tersebut dinamakan "penyambang"<sup>5)</sup>. Selain membeli ikan "penyambang" juga menyediakan barang-barang lain seperti untuk kebutuhan hidup dan bahan-bahan alat penangkapan. Ikan hasil

<sup>4)</sup> Hartiningsih Marta dan Maruli Tobing: "Kondisi Sosek Nelayan", Kompas, 5, 6 dan 7 Agustus 1991.

<sup>5)</sup> Abunawan Mintoro dkk. "Dampak Program Pembangunan Terhadap Tenaga Kerja, Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan di Kalimantan Selatan", PAE, 1986. X-9.

pembelian dibawa ke pusat-pusat pemasaran ikan yang dianggap harga ikan cukup baik, misal di Banjarmasin. Dalam migrasi musiman, nelayan membawa istri dan anak-anaknya yang tidak sekolah dan tinggal di rumah yang dibuat secara sederhana dipantai-pantai atau di pemukiman penduduk yang terdekat dengan menyewa rumah. Migrasi musiman tersebut tidak hanya dilakukan oleh nelayan Kalimantan Selatan tetapi juga oleh nelayan Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan bila pada musim ikan. Pola "penyambang" tersebut kurang bisa berkembang secara meluas karena secara resmi penjualan/pembelian ikan di laut dilarang, harus melalui T.P.I supaya retribusi bisa ditarik. Pada tempat-tempat berkumpulnya nelayan pada pola "penyambang" tidak berkembang menjadi ramai karena relatif terpencil dan jalan darat masih susah ditempuh.

Hampir serupa dengan sistem "penyambang" ialah sistem PIR di perairan Irian dimana perusahaan inti PT. Usaha Mina dengan kapal-kapalnya mengunjungi konsentrasi nelayan-nelayan kecil untuk membeli ikan.<sup>6)</sup>

#### **Pola "SSFDP" (Small Scale Fisheries Development Project) di Lombok**

Pola "SSFDP" terjadi sebagai pola yang diperkenalkan pada masyarakat nelayan karena adanya pemberi bantuan dana pemerintah Jerman melalui G.T.Z. (Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit) membina dan membantu modal pada nelayan langsung di lapang. Bantuan dalam bentuk pinjaman bergilir untuk membeli kapal motor dan alat penangkapan, tehnik penangkapan ikan, mengelola usaha penangkapan ikan dalam kelompok U.B (Usaha Bersama), mencari dan menemukan "fishing ground" (tempat penangkapan) ikan baru. Hal tersebut dimungkinkan selain dana yang cukup besar tersedia proyek mempekerjakan pakar-pakar perkapalan, biologi dan sosial ekonomi dari dalam dan luar negeri. Secara efektif proyek dilaksanakan di kabupaten Lombok Timur untuk penangkapan ikan di laut pada tahun 1986 s/d 1991. Dalam pemasaran ikan, "SSFDP" mengikuti pola T.P.I

(ikan dijual melalui T.P.I). T.P.I yang dekat dengan pemukiman nelayan SSFDP belum berfungsi dengan baik. Pemasaran secara "riel" dilakukan oleh "palele" dan bakul ikan. "Palele" adalah pedagang perantara ikan yang juga bertindak sebagai "bapak angkat" dimana bila ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh nelayan "palele" membantu terutama dalam soal keuangan. Ikatan antara "palele" dan nelayan cenderung dalam bentuk ikatan batin. Rumah-rumah "palele" tidak beda jauh dengan perumahan nelayan yang diurusnya. "Palele" mendapatkan komisi 10 persen dari hasil penjualan termasuk didalamnya retribusi yang harus dibayarkan pada T.P.I yang ada. Bakul adalah pedagang ikan yang tidak ada ikatan dengan nelayan.

Pemukiman nelayan SSFDP terletak kira-kira 2 jam pelayaran dari T.P.I. SSFDP secara aktif mendidik nelayan yang mendapat kapal ikan dan peralatannya secara kredit menjadi nelayan pemilik, secara bersama. Satu kapal penangkap ikan secara bersama dimiliki oleh seluruh awak kapal (juragan laut dan awak kapal lainnya) secara bersama dengan kedudukan yang sederajat. Pendidikan teknis penangkapan diberikan dalam waktu kurang lebih tiga bulan teori dan praktek untuk seluruh awak kapal.

Dalam proses pra penangkapan di daerah pemukiman nelayan dibentuk U.B. (Usaha Bersama) beranggotakan nelayan SSFDP yang tugas pokoknya antara lain mengelola kios barang-barang yang diperlukan kapal ikan untuk melaut (terdapat 18 kapal SSFDP yang dibuat dari "fibre glass" rancangan proyek). Di pemukiman nelayan juga disediakan bengkel kapal nelayan dimana montirnya dibina dan disubsidi oleh proyek. Pengurus U.B berasal dari awak kapal yang dengan bantuan proyek memperhitungkan pendapatan kapal penangkapan, dari hasil tangkapan, ongkos melaut, pembayaran angsuran kredit yang dibayarkan ke bank, dan pembayaran iuran-iuran wajib anggota U.B. Dalam membina U.B proyek dibantu oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada di Lombok.

Berbeda dengan interaksi antar awak kapal pada perahu penangkap ikan yang umum. Dalam kapal SSFDP karena seluruh awak kapal yang juga pemilik tidak bisa berpindah ke perahu/kapal lain bila terjadi konflik diantara mereka. Akibatnya dari pola SSFDP ini dari 18 kapal, pada 10 kapal juragan lautnya dipaksa keluar dari kelompok oleh awak kapal yang lain.

<sup>6)</sup> Soepanto, "Peningkatan PIR Sistem Rumpon PT. Usaha Mina (Persero)", PT. Usaha Mina, Jakarta 1987, hal. 3 & 4.

Dari evaluasi atas pelaksanaan proyek setahun sebelum proyek berakhir antara lain beberapa hal yang patut diperhatikan<sup>7)</sup>:

- a. Sampai saat proyek hampir berakhir, U.B belum bisa mandiri. Masalah-masalah konflik dalam U.B masih harus diselesaikan oleh proyek, U.B belum bisa mengatasi sendiri. Cara perhitungan utang-piutang nelayan pada kios maupun untuk angsuran belum dikuasai oleh anggota, banyak anggota yang tidak tahu berapa jumlah angsuran yang harus dibayar dan berapa sisa kredit.
- b. Terdapat kecenderungan para pengurus U.B yang juga nelayan berusaha menghindar kerja di laut dengan alasan kerja untuk U.B di darat.
- c. Diabaikannya status sosial "juragan laut" dalam pembinaan menyebabkan tidak stabilnya kelompok.
- d. Kelompok awak kapal menjadi kelompok tertutup.
- e. Kehadiran kapal SSFDP sekitar T.P.I menyebabkan adanya gejala "over supply" ikan calang (ikan yang ditangkap kapal SSFDP).
- f. Dengan biaya yang cukup besar untuk membiayai kegiatan proyek hanya mampu membina 18 kapal yang merupakan sebagian kecil dari populasi nelayan yang ada (diperkirakan hanya sekitar 2 persen).

### **Pola "Toke"**

"Toke" adalah pemilik modal yang ikut mengelola persiapan dan penyediaan kapal penangkap ikan untuk melaut, memasarkan ikan, memproses ikan, memberi hutang pada awak kapal bila memerlukan untuk membeli peralatan tangkap, keperluan rumah tangga. Pola "toke" dalam penangkapan ikan terdapat di pantai kabupaten Langkat.

Di daerah dimana pola "toke" berjalan terdapat T.P.I yang tidak berfungsi. Tiap "toke" punya tempat pendaratan ikan tersendiri (di daerah dinamakan "tangkah") dan "toke" membayar retribusi kepada T.P.I di daerah tersebut. "Toke" umumnya berhubungan dengan nelayan melalui "tekong". "Tekong" adalah juragan laut yang dipercaya oleh "toke". Selain "toke" untuk jenis ikan apa saja ada juga "toke" untuk ikan tertentu, misal untuk rajungan saja, kepiting saja, udang saja. Dengan adanya jumlah "toke" yang cukup banyak mereka bersaing dalam memberikan pelayanan

pada nelayan. Tidak jarang "juragan laut" yang tinggi keahliannya "ditransfer" dari "toke" satu ke "toke" yang lain dengan ganti rugi (uang transfer).

Di daerah pola "toke" terdapat dua jenis nelayan: (1) nelayan bebas yang tidak terikat hutang, bebas memasarkan hasil tangkapannya pada "toke" yang memberi harga paling baik, dan (2) nelayan yang terikat pada "toke" karena hutang. Nelayan jenis terakhir tersebut diwajibkan menjual ikannya pada "toke" dengan harga 10–30 persen lebih rendah dari harga pasaran (besarnya sesuai dengan perjanjian) sampai hutangnya lunas terbayar. Tetapi nelayan terikat tersebut dapat menjual ikan pada "toke" lain bila dirasa "toke" yang dihutangi sudah diperingatkan akan pemberian harga yang terlalu rendah. Hasil jualannya pada "toke" yang lain tersebut kemudian dipotong seperti bila "toke" tempat berutang membeli. Angsuran hutang dibayarkan secara langsung dipotong pada tiap tangkapan atau tidak langsung, pada saat nelayan mampu dan ingin membayar. Resiko tidak terbayarnya hutang sekitar 30 persen.<sup>8)</sup>

Terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan pada pola "toke":

- a. Modal dari luar daerah bisa diinvestasikan pada perikanan melalui "toke". Umumnya dari Medan, tetapi ada pula modal berasal dari pedesaan sendiri (55% dari "toke" contoh).
- b. "Toke" yang bisa hidup adalah "toke" yang bisa membeli dan menyalurkan pemasaran ikan dengan baik. Sehingga seorang "toke" diharuskan mempunyai jaminan pemasaran ikan yang cukup stabil. Selain "toke" yang kawasannya dalam propinsi (Medan dan sekitarnya) banyak pula yang daerah pemasarannya untuk Singapura, Hongkong dan negara lain. Informasi mengenai keadaan pasar dengan cepat sampai ke daerah karena terdapat beberapa alat penerima dan pemancar radio yang kuat di kota Langkat untuk menerima dan memberi informasi pasar. Sehingga relatif berapapun besarnya hasil tangkapan selalu dapat dipasarkan dengan mudah.
- c. Ikan-ikan yang secara ekonomis rendahpun (ikan rusak) dapat tertampung karena para "toke" juga menanam modal pada peternakan itik yang mengkonsumsi ikan jenis-jenis tersebut.

<sup>7)</sup> Team Konsultan, "Report of SSFDP Project, Review Mission", Jakarta 1990.

<sup>8)</sup> Mintoro, Abunawan. "Sistem Pemasaran dan Kredit Informal pada Nelayan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara", FAE Vol.7 No.1 Juli 1989, hal. 35 s/d 43.

- d. "Toke" bagi nelayan setempat merupakan status sosial yang cukup tinggi dan terhormat. Sehingga dipelosok pedesaan dapat timbul beberapa "toke pribumi" yang umumnya dari nelayan yang punya jiwa wiraswasta.
- e. Terdapat kesan dominasi "toke" pada kehidupan nelayan di daerah perkotaan (Langkat) tetapi ada mekanisme persaingan yang bisa mengurangi gejala tersebut.

## ANALISA PERBANDINGAN POLA/SISTEM USAHA PERIKANAN

Dari uraian diatas disederhanakan dalam bentuk skema pada Gambar 1. Beberapa hal yang dapat diuraikan dari gambar tersebut sebagai berikut:

1. Pada kegiatan pra penangkapan dalam keempat pola nampaknya jasa untuk membeli saprodi dan perbekalan ke laut diperlukan oleh nelayan. Hal tersebut terlihat pada:
  - a. Dalam sistem T.P.I juragan darat dapat dianggap sebagai pemberi jasa. Demikian pula jasa para pengusaha toko-toko bahan keperluan nelayan yang mencatat pembelian dan pembayaran dalam satu periode tertentu secara berkesinambungan adalah pemberian jasa diluar kegiatan pembelian yang dilakukan oleh nelayan.
  - b. Dalam sistem "penyambang" dimana "penyambang" juga sebagai pedagang ikan yang mendekatkan pelayanan penjualan barang-barang keperluan nelayan ditempat penangkapan ikan.
  - c. SSFDP membentuk U.B yang memberikan jasa pelayanan khusus pada perahu/kapal SSFDP untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk melaut.
  - d. "Toke" adalah pembuat pembukuan nelayan mengenai perhitungan ongkos dan pendapatan nelayan pada nelayan-nelayan yang dibawah kelolaannya.

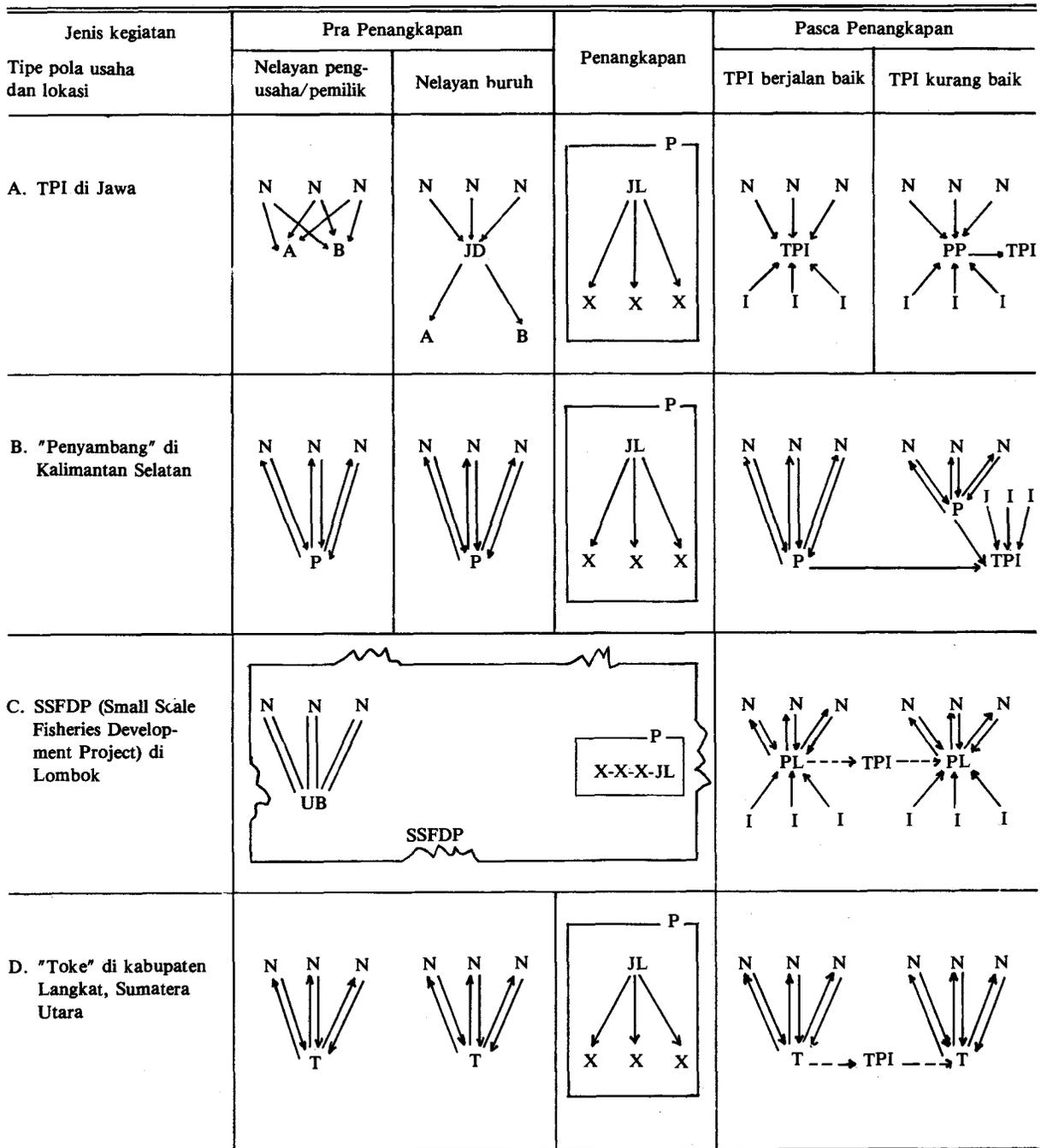
Terdapat gejala pembagian pekerjaan ("division of labour") antara pemberi jasa dan nelayan. Hal tersebut terlihat adanya kecenderungan nelayan yang menjadi pengurus U.B menghindari kerja di laut (lihat uraian pada Bab Pola SSFDP di Lombok).
2. Pada kegiatan penangkapan "hierachi" status sosial diperlukan dalam pengaturan pekerjaan di laut. Hal tersebut terlihat pada kasus pola SSFDP dimana akibat kesamaan hak pemilikan

atas perahu dan peralatannya menyebabkan pecahnya kelompok awak perahu (lihat uraian Bab Pola SSFDP di Lombok). Selain itu dinamika kelompok awak perahu sebagai kelompok terbuka sangat diperlukan untuk meredakan konflik yang ada. Adanya pola pembinaan SSFDP yang menyebabkan kelompok awak kapal menjadi tertutup menyebabkan kelompok tersebut tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri dan selalu minta bantuan proyek untuk memecahkannya.

Di dalam kelompok awak kapal yang terikat hutang seperti dalam kasus dalam pola "toke" masih dapat terjadi perpindahan awak kapal diantara para "toke" dan "tekong" (juragan laut). Hal tersebut membuktikan bahwa dinamika kelompok awak kapal memerlukan mekanisme peredam konflik yang selalu dapat terjadi sewaktu-waktu terutama dalam kehidupan nelayan yang cenderung bersifat keras.

3. Dari keempat pola yang ada, pola T.P.I sebagai pola yang secara konsepsional merupakan tempat satu-satunya nelayan bisa menjual ikannya. Ketiga sistem lainnya nelayan dapat memilih pada orang/pedagang yang berbeda untuk bisa menjual ikannya dan dalam sifat hubungan nelayan dan pedagang cenderung bersifat personal semacam hubungan bapak angkat. Dimana "toke", "palele" dan "penyambang" dapat membantu nelayan dalam mengatasi masalahnya secara langsung dan tidak langsung (melalui "tekong"/juragan laut). Beberapa sifat pada T.P.I yang dapat dilihat ialah:
  - a. Suatu cara yang lebih mudah dikembangkan secara meluas.
  - b. Proses penjualan ikan berlangsung secara impersonal yang sesuai untuk nelayan menengah ke atas. Atau bila dikembangkan pada nelayan kecil prosesnya dapat berjalan terus tanpa terhambat masalah-masalah nelayan kecil yang hampir selalu susah dibedakan antara masalah ongkos produksi dengan biaya hidup rumah tangga.
  - c. Pada lokasi T.P.I yang berjalan dengan baik perkembangannya diiringi perkembangan sektor lain sehingga kesempatan kerja bertambah.
  - d. T.P.I dapat berkembang baik diantaranya harus didukung oleh adanya sarana transportasi yang baik. Hal tersebut merupakan syarat mutlak untuk bisa masuknya pedagang dari luar ke dalam maupun dari dalam ke luar lokasi T.P.I.

Gambar 1. Skema hubungan antara nelayan (juragan laut dan anak buah kapal), pedagang ikan dan saprodi serta pemilik modal ("toke"), T.P.I (Tempat Pelelangan Ikan) berdasarkan tipe pola usaha perikanan rakyat.



Keterangan: N = Nelayan

I = Pedagang ikan

A = Pedagang saprodi

B = Pedagang makanan

X = Pendega (awak kapal)

P = Perahu

T = Toke

PP = Pedagang

perantara

JL = Juragan laut/kapten kapal

PL = Palele

JD = Juragan darat

UB = Usaha bersama

## KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

### Kesimpulan

1. Pada keempat pola usaha penangkapan ikan dalam kegiatan pra penangkapan dan pasca penangkapan dalam hubungannya dengan pedagang, nelayan tidak mampu berdiri sendiri, dan cenderung memerlukan jasa perantara.
2. Meskipun jasa perantara tersebut sudah dicoba dihasilkan oleh nelayan sendiri dengan bantuan SSFDP, tetapi setelah bisa dihasilkan melalui U.B (usaha bersama) ternyata personalia pemberi tugas tersebut berusaha memisahkan usahanya dengan kegiatan nelayan.
3. Pemberian jasa tersebut diperlukan oleh nelayan dalam bentuk hubungan yang bersifat lebih personal.
4. Dibandingkan dengan pola usaha lain, pada pola T.P.I hubungan nelayan dan pedagang bersifat lebih impersonal, keadaan tersebut lebih sesuai untuk nelayan menengah keatas dengan hasil tangkapan yang relatif banyak.
5. Dalam satu kapal penangkap ikan, kesenjangan kekuasaan "juragan laut", awak kapal dan sifat keterbukaan kelompok (anak kapal dengan mudah dapat berganti kelompok) diperlukan untuk meredam konflik yang kadang-kadang terjadi.
6. Dalam usaha perikanan rakyat kelompok kerja pada kegiatan penangkapan (secara umum disebut kelompok nelayan) secara alamiah dapat menjadi kelompok usaha yang ekonomis menguntungkan apabila bergabung dalam kelompok (unit) usaha yang mengelola kegiatan pra-pasca penangkapan dan penangkapan dalam satu unit. Hal tersebut terjadi pada kelompok-kelompok nelayan yang tergabung dalam kelolaan satu "toke".
7. Pengembangan perikanan rakyat di daerah terpencil pola "penyambang" (carrier) merupakan alternatif yang sesuai.

### Saran-saran

1. Strategi pembinaan nelayan melalui kelompok heterogen yaitu antara kelompok kerja pra-pasca penangkapan dan penangkapan menjadi satu unit usaha dapat menjadi alternatif pola pembinaan yang sekarang ada.
2. Pelarangan pembelian ikan di laut perlu dipertimbangkan kembali khususnya untuk daerah-daerah terpencil dimana sistem "penyambang" (carrier) sesuai untuk berkembang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hartiningsih, Marta dan Maruli Tobing:
- a. "Kondisi Sosek Nelayan 1: Antara Hutang dan Harga Ikan", Kompas, 5 Agustus 1991.
  - b. "Bakul Seret, Tradisi yang Menisbikan T.P.I", Kompas, 5 Agustus 1991.
  - c. "Kondisi Sosek Nelayan 2: Yang Dijarah Yang Lemah", Kompas 6 Agustus 1991.
  - d. "Kondisi Sosek Nelayan 3: Tak Semending Petani Gurem", Kompas 7 Agustus 1991.
- Manurung, Victor T. dan Mat Syukur: "Dampak Pelelangan Terhadap Stabilisasi Harga Ikan Pada Tingkat Produsen di Pantai Utara Jawa". Forum Agro Ekonomi, Vol.7 No.2 Desember 1989, hal. 14, 15 dan 19.
- Mintoro, Abunawan; Budi Santoso; Tahlim Sudaryanto dan Adreng Purwoto: "Dampak Program Pembangunan Terhadap Tenaga Kerja, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan Kalimantan Selatan". Patanas, Proyek Penelitian Agro Ekonomi, 1988, hal. X-9.
- Mintoro, Abunawan: "Sistem Pemasaran dan Kredit Informal pada Nelayan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara". Forum Agro Ekonomi, Vol.7 No.1 Juli 1989, hal. 35 s/d 43.
- Soepanto: "Peningkatan PIR Sistem Rumpon PT. Usaha Mina (Persero)", PT. Usaha Mina, Jakarta 1989, hal. 3 dan 4.
- Team Peneliti: "Kegiatan Nelayan di Musim Paceklik di Empat Propinsi di Pulau Jawa". Litbang Depnakertrans dan Yayasan S.A.E., Bogor 1982, hal. 6-1 s/d 6-7.
- Team Konsultan: "Report of SSFDP Project, Review Mission". Jakarta 1990.